

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Elit Lokal

Ilmu politik sebagai suatu khazanah keilmuan ruang lingkup ranah pembahasannya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) ranah, yaitu: pemikiran, kelembagaan, dan kekuasaan. Terkait hal tersebut kajian tentang teori elit dan kekuasaan sampai sekarang masih relevan untuk dibahas. Sumbangsih paling besar teori ini terhadap ilmu politik adalah untuk memahami konfigurasi politik disuatu arena publik.

Menurut Thompson (1975), bahwa elit lokal terdiri dari berbagai bentuk, berdasarkan pada sumberdaya yang dimilikinya yaitu: *Pertama*, elit lokal yang muncul karena kekuatan ekonomi yang dimiliki. Dalam hal ini, melihat penguasa atau tuan tanah daerah yang mampu menggerakkan masyarakat disekitarnya diatas fundamental ekonominya itu. *Kedua*, elit lokal kemunculannya bersumber dari kekuasaan publik yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini, berbagai pejabat birokrasi di daerah yang dapat menentukan arah sosial dan mengendalikan warga sekitarnya (Koirudin, 2005: 24).

Elit lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan politik (*kekuasaan*) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjelaskan kebijakan politik. Elit politiknya seperti, Gubernur, Bupati,

Walikota, Ketua DPRD dan Pimpinan Partai Politik (Sumber: alfetblogger.blogspot.com/2013/02/27, diakses tanggal 02 November 2018).

Elit lokal merupakan aliansi dari orang yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh didalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan financial yang relatif tinggi dibanding masyarakat umum (Sumber: swytoputra.blogspot.com/2010/12/elit-lokal-politik.html, diakses tanggal 02 November 2018).

Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elit yaitu:

1. Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.
2. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elit itu memberikan tanggapannya.

Sementara Mosca melihat bahwa pengertian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar dikelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.

Menurut Aristoteles elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elit klasik, bahwa setiap masyarakat suatu minoritas membuat keputusan- keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh

Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh sosiologis politik Italia yaitu Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Jayadi Nas, 2007: 34).

2. Teori Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisahkan-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005: 243).

Tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola hidupnya. Hal ini, bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) yaitu unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono, 2005: 244).

Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan dipegang aktor politik. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian senada juga pernah dilakukan oleh saudara Roni Romansyah Mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan judul

“Peran Kiai Dalam Pemilu Di Kabupaten Tasikmalaya”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam hal, Peran Kiai Dalam Pemilu Kabupaten Tasikmalaya dengan penelitian sama-sama membahas tentang Peran Kiai dan juga sama-sama menghasilkan kemenangan politik. Yang membedakan dalam Penelitian ini adalah Pemilu dengan Pilkada.

Selanjutnya penelitian oleh Saudara Gumilar Ahmad tentang “Perilaku Politik Kyai Studi Kasus Perilaku Politik Kyai Pesantren di Kecamatan Salopa Pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perilaku Politik Kyai Pesantren Pada Pemilukada Di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kyai namun kajian yang diangkat oleh Saudara Gumilar Ahmad memfokuskan pada perilaku Kyai dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus.

Tabel 1
Matriks Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.
Peran Kiai Dalam Pemilu Di Kabupaten Tasikmalaya oleh Roni Romansyah,
Universitas Siliwangi.

Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penelitian ini membahas tentang Peran Kiai dalam Pemilu Kabupaten Tasikmalaya.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Peran Kyai. Penelitian ini juga sama-sama menghasilkan pada kemenangan.	Penelitian saudara Roni membahas tentang Peran Kiai dalam Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan adalah Peran Kyai dalam Pemenangan Pilkada Serentak Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis 2018.

Selanjutnya Perilaku Politik Kyai Studi Kasus Perilaku Politik Kyai Pesantren di Kecamatan Salopa Pada Pemilu Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Oleh Gumilar Ahmad, Universitas Siliwangi.

Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Penelitian ini membahas tentang Perilaku Politik Kyai Pesantren di Kecamatan Salopa Pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang Kyai dalam kemenangan yang dilakukan untuk memperoleh dukungan suara.</p>	<p>Penelitian saudara Gumilar Ahmad menjelaskan bagaimana perilaku Kyai dalam Pemilukada di kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan adalah Peran Kyai dalam Pemenangan Pilkada Serentak Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis 2018.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1

